

**EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA
PERLIS : PROYEKSI, REALISASI DAN POTENSI
KEBERLANJUTAN**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Program Studi Ekonomi Pembangunan



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

Nama : Namira Ustariana
NPM : 2105180030
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapten Mukhtar Basri, No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN TUGAS AKHIR

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Senin, Tanggal 21 April 2025, pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya,

MEMUTUSKAN

Nama : NAMIRA USTARIANA
NPM : 2105180030
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Judul Tugas Akhir : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI
DESA PERLIS : PROYEKSI, REALISASI DAN POTENSI
KEBERLANJUTAN
Dinyatakan : (A) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

TIM PENGUJI

Penguji I

Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si

Penguji II

Dra. Roswita Hafni, M.Si

PEMBIMBING

(Dr. Sylvia Vianty Ranita, S.E., M.Si)

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si., CMA

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri, No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Tugas Akhir ini disusun oleh :

Nama Lengkap : NAMIRA USTARIANA
NPM : 2105180030
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat Rumah : JL. UMAR, GG. DJOJODIHARDJO NO.61
Judul Tugas Akhir : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI
DESA PERLIS : PROYEKSI, REALISASI DAN POTENSI
KEBERLANJUTAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan Tugas Akhir.

Medan, 28 Maret 2025

Pembimbing Tugas Akhir

Dr. SYLVIA VIANTY RANITA, S.E., M.Si.

Diketahui/Disetujui

Oleh :

Ketua Program Studi
Ekonomi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, S.E., M.Si

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. H. JANURI, S.E., M.M., M.Si., CMA.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama Lengkap : NAMIRA USTARIANA
N.P.M : 2105180030
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN
Alamat : Jl. Umar Gg. Djojedihardjo No. 61
Judul Tugas Akhir : EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI
DESA PERLIS : PROYEKSI, REALISASI DAN POTENSI
KEBERLANJUTAN

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari data-data dari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan hasil karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yang Menyatakan



Namira Ustariana
NAMIRA USTARIANA

ABSTRAK

EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI DESA PERLIS : PROYEKSI, REALISASI DAN POTENSI KEBERLANJUTAN

Namira Ustariana
Program Studi Ekonomi Pembangunan
Email : ustarianamira17@gmail.com

Perlis adalah desa 3T yang menghadapi berbagai kendala dalam pengembangan UMKM, seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi digital, sulitnya pemasaran, dan belum terselesaikannya legalitas usaha. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis menggunakan model evaluasi CIPP (Context, Input, Process, Product). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi, serta data diperoleh melalui observasi langsung saat kegiatan pemberdayaan berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tetapi masih menghadapi hambatan dalam implementasi. Pelatihan digital marketing kurang efektif karena keterbatasan perangkat dan literasi digital pelaku UMKM. Proses legalitas usaha masih belum selesai, sehingga bantuan dari pemerintah belum bisa diakses. Pengaktifan kembali BUMDes berjalan lambat akibat minimnya keterampilan pengelolaan.

Kata Kunci: Pemberdayaan UMKM, Model CIPP, Evaluasi, Digital Marketing, BUMDes

ABSTRACT

EVALUATION OF THE UMKM EMPOWERMENT PROGRAM IN PERLIS VILLAGE: PROJECTION, REALIZATION, AND SUSTAINABILITY POTENTIAL

Namira Ustariana

Economics Development Program

Email : ustarianamira17@gmail.com

Perlis Village, classified as a 3T area, faces challenges in UMKM development, including limited capital access, low digital literacy, marketing difficulties, and unresolved business legality issues. This study aims to evaluate the effectiveness of the UMKM empowerment program in Perlis Village using the CIPP (Context, Input, Process, Product) evaluation model. This research employs a qualitative descriptive method with an observational approach, collecting data through interviews, documentation, and program analysis. The findings indicate that while the program aligns with local needs, its implementation faces challenges. Digital marketing training is ineffective due to limited device ownership and digital literacy. Business legalization remains incomplete, preventing access to government assistance. BUMDes reactivation is slow due to a lack of management skills.

Keywords : UMKM Empowerment, CIPP Model, Evaluation, Digital Marketing, BUMDes

KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini dengan judul **“Evaluasi Program Pemberdayaan UMKM di Desa Perlis : Proyeksi, Realisasi Dan Potensi Keberlanjutan”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Penulis menyadari bahwa proposal ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasehat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada :

1. Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa menguatkan hati, memberikan petunjuk di setiap langkah, serta melimpahkan rezeki dan karunia-Nya yang tiada henti. Tanpa kasih sayang dan pertolongan-Nya, penulis bukanlah siapa-siapa dan tiada memiliki kekuatan untuk mencapai apa yang telah penulis lalui hingga saat ini. Segala kemudahan, keberhasilan, dan kebahagiaan yang penulis rasakan adalah bukti nyata dari kebesaran dan kasih-Nya.
2. Ayahanda (almarhum) Mustika dan Ibunda Zahriyah tercinta berkat doa, kasih sayang dan dukungan baik moril maupun material sehingga penulis dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ucapan terimakasih kepada kakak dan adik tersayang, Gustia Ustariana dan Muhammad King Gayo yang selalu memberikan dukungan yang luar biasa.
3. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc., Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Assoc., Dr. H. Ade Gunawan, S.E., M.M., M.Si, selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E., M.M., M.Si, selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E., M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Sylvia Vianty Ranita, S.E., M.Si, selaku Dosen Pembimbing tugas akhir atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga proposal ini dapat diselesaikan dengan baik.

9. Bapak dan Ibu Dosen pengajar di Program Studi Ekonomi Pembangunan atas segala bimbingan, nasihat dan ilmu yang bermanfaat.
10. Teman-teman kelas A Program Studi Ekonomi Pembangunan angkatan 2021 yang telah menghabiskan waktu selama 8 semester bersama.
11. Teman-teman seperjuangan pada ajang perlombaan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK Ormawa) tahun 2024 yang telah mengabdikan bersama selama 6 bulan program berlangsung di Desa Perlis. Tanpa perjuangan dan kerjasama semua anggota tim pelaksana, tidak mungkin kita sampai di titik dimana kita mendapatkan bebas tugas akhir dan berangkat ke Bali.
12. Teman-teman organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan dan UKM *UMSU Debating Society* (UDS) sebagai media pembelajaran di luar kelas yang telah memberikan banyak sekali kesempatan untuk penulis berkembang. Kepada senior-senior UDS yang telah berbaik hati menjadi mentor panutan yang memberikan saran, arahan dan nasihat untuk selalu menjadi manusia yang rasional, bermoral dan *stoic* setiap saat.

Dengan segala keterbatasan dan kerendahan hati dalam menyusun tugas akhir, penulis sangat menyadari bahwa karya ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, saran dan kritik yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan demi kelayakan dan kesempurnaan kedepannya agar dapat bermanfaat oleh khalayak umum.

Medan, 13 Januari 2025

Namira Ustariana
2105180030

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	ixii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah.....	6
1.5 Tujuan Penelitian	7
1.6 Manfaat Penelitian	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
2.1. Landasan Teori	8
2.1.1. Pemberdayaan.....	8
2.1.4.1. Pengertian Pemberdayaan	8
2.1.4.2. Teori Pemberdayaan.....	9
2.1.4.3. Tahapan Pemberdayaan	12
2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	13
2.1.3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	14
2.1.4. Evaluasi.....	16
2.2. Penelitian Terdahulu	17
2.3. Kerangka Konseptual.....	20
2.4. Hipotesis	21
BAB III METODE PENELITIAN	22
3.1 Jenis Penelitian.....	22
3.2 Definisi Operasional.....	22
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian	23

3.3.1	Tempat Penelitian	23
3.3.2	Waktu Penelitian	23
3.4	Teknik Pengumpulan Data	24
3.4.1	Observasi	24
3.5	Teknik Analisis Data	24
BAB IV HASIL PENELITIAN.....		26
4.1	Gambaran Umum	26
4.1.1	Kondisi Geografis Desa Perlis	26
4.1.2	Kondisi Demografi Desa Perlis	26
4.1.3	Kondisi UMKM Desa Perlis	27
4.1.4	Program Pemberdayaan UMKM di Desa Perlis	30
4.1.4.1	Proyeksi Program Pemberdayaan UMKM	30
4.1.4.2	Realisasi Program Pemberdayaan UMKM	31
4.1.4.3	Potensi Keberlanjutan.....	33
4.2	Analisis Data	35
4.2.1	Pengujian Hipotesis	35
4.2.2	Pembahasan	39
BAB V PENUTUP		40
5.1	Kesimpulan	40
5.2	Saran	40
5.3	Keterbatasan Penelitian	41
DAFTAR PUSTAKA		42

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu	17
Tabel 3.2 Definisi Operasional	22

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat merupakan hal yang esensial untuk dilakukan. Hal ini berkaitan dengan *Sustainable Development Goals (SDGs)* dimana pemerintah harus memastikan upaya untuk menghapus kemiskinan (poin 1), pekerjaan yang layak disertai pertumbuhan ekonomi (poin 8), praktik konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab (poin 12) serta memperkuat kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (poin 17).

Tantangan utama yang dihadapi suatu komunitas atau wilayah terletak pada bagaimana menciptakan masyarakat yang berdaya secara sosial dan ekonomi serta merumuskan strategi untuk mewujudkannya secara berkelanjutan. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat menjadi pendekatan fundamental dalam pembangunan, berfokus pada penguatan kapasitas individu maupun kelompok agar mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan menentukan masa depan mereka sendiri. Pemberdayaan bertujuan untuk mendorong transformasi positif, khususnya dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Sebagai strategi pembangunan berbasis masyarakat, pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama sekaligus subjek dalam proses pembangunan. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa masyarakat desa masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan dan keterbelakangan,

sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan harkat, martabat serta kemandirian agar mereka dapat berkontribusi secara optimal terhadap pembangunan. (Endah, 2020)

Posisi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dikatakan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi karena UMKM dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan berperan dalam pendistribusian hasil-hasil pembangunan serta pembentukan dominansi Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan lainnya adalah usaha mikro dan kecil memiliki keunggulan dalam bidang yang memanfaatkan sumber daya alam dan padat karya, utamanya dalam sektor pertanian tanaman pangan perkebunan, peternakan, perikanan perdagangan dan rumah makan. Usaha menengah memiliki keunggulan dalam penciptaan nilai tambah di sektor keuangan, persewaan, jasa perusahaan dan kehutanan. Usaha besar memiliki keunggulan dalam industri pengolahan, listrik, gas, komunikasi, dan pertambangan. Maka hal ini membuktikan bahwa UMKM dan usaha besar saling melengkapi dan saling membutuhkan, meskipun pada kenyataannya UMKM lebih dominan dalam penyerapan tenaga kerja hingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional. (Hidayat, Lesmana and Latifah, 2022).

Perkembangan ekonomi di wilayah perdesaan, khususnya desa maritim, berperan penting dalam menciptakan keseimbangan dan kemajuan ekonomi yang berkeadilan. Potensi ekonomi lokal menjadi dasar dalam upaya pemberdayaan masyarakat dan percepatan pertumbuhan ekonomi agar komoditas unggulan desa

memiliki daya saing lebih tinggi di pasar. Kondisi geografis desa maritim memengaruhi aktivitas ekonomi yang didominasi oleh perikanan, perdagangan, wisata bahari, dan transportasi. Untuk mendukung pertumbuhan ini, penyediaan infrastruktur ekonomi, termasuk penguatan koperasi dan UMKM menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Keberadaan UMKM di desa maritim tidak hanya memperkuat sektor informal tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, yang pada akhirnya berdampak pada pembangunan ekonomi regional (BPS, 2015).

Desa Perlis merupakan salah satu desa maritim yang terus berupaya melakukan pengembangan UMKM terutama dalam makanan olahan hasil laut seperti terasi, ikan asin, dan olahan lainnya. Berdasarkan letak dan posisinya yang menempati kawasan pesisir, Desa Perlis dikenal sebagai perkampungan nelayan yang mayoritas penduduknya bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber utama penghidupan. Meski begitu, terdapat sejumlah warga yang menjalankan usaha dagang, guru, buruh, PNS dan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa setempat, didapatkan temuan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp. 1.000.000 per-bulan yang berada di bawah standar pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan rata-rata pendidikan akhir SMA dengan jumlah angkatan kerja 2.574 jiwa. Saat ini Desa Perlis tergolong tertinggal menurut Indeks Desa Membangun dan tergolong Berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Rahayu, RS and Sinambela, 2022), sungai dan laut di sekitar Desa Perlis merupakan habitat berbagai jenis ikan

gembung, senangin, kuring, cerbung, kepiting dan udang. Di bidang kewirausahaan sudah terjadi upaya untuk mengolah hasil laut menjadi produk khas seperti terasi, kerupuk ikan, ikan asin dan olahan ikan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa ada inisiatif pengembangan selain menjual mentah hasil laut. Dari banyaknya potensi besar hasil lautan, justru kemiskinan banyak terjadi di wilayah pesisir, khususnya masih banyak kemiskinan melanda kehidupan nelayan kecil.

Kemiskinan yang dialami nelayan merupakan permasalahan multidimensional yang membutuhkan pendekatan solusi yang komprehensif, bukan hanya pendekatan parsial. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan identifikasi mendalam terhadap penyebab yang mempertahankan kondisi kemiskinan di kalangan nelayan atau masyarakat pesisir. Salah satu faktor utama adalah kebijakan pemerintah yang sering kali kurang berpihak pada kelompok masyarakat pesisir. Banyak kebijakan penanggulangan kemiskinan bersifat *top-down*, dengan masyarakat lebih sering diposisikan sebagai objek penerima kebijakan daripada sebagai subjek yang berperan aktif. (Sabarisman, 2017)

Kajian ini mendefinisikan pemberdayaan masyarakat (*empowerment of the community*) dan pembangunan masyarakat (*community development*) sebagai upaya sistematis yang dilakukan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat lokal merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya yang mereka miliki sehingga mereka dapat mencapai kemampuan dan kemandirian yang berkelanjutan secara ekonomi, ekologis, dan sosial. Di Desa Perlis, telah diterapkan berbagai program pemberdayaan seperti Program Perlis Cinta Lingkungan, Hidroponik, Bank

Sampah, bantuan-bantuan alat tangkap dari Dinas Perikanan dan Kelautan, bantuan pohon mangga dari Dinas Pertanian dan Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Kemahasiswaan (PPK ORMAWA) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Namun, program-program ini belum menunjukkan dampak yang signifikan untuk masyarakat setempat. Berbagai pihak berargumen bahwa program-program yang dijalankan kurang relevan dengan kondisi masyarakat pesisir yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan. Kendati demikian, masalah utama yang diidentifikasi justru terletak pada rendahnya partisipasi sumber daya manusia di Desa Perlis dalam mengimplementasikan program-program pemberdayaan yang telah dirancang. (Insani, Harahap and Syahriza, 2024)

Evaluasi terhadap program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis menjadi langkah yang sangat penting, mengingat meskipun telah banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan, kondisi perekonomian masyarakat di desa ini masih stagnan. Mayoritas penduduk tetap berada dalam kemiskinan struktural dengan pendapatan rata-rata jauh di bawah standar layak dan rendahnya kesadaran mengenai pentingnya pendidikan sebagai elemen penting dalam pembangunan kapasitas individu. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesenjangan serius antara proyeksi yang diharapkan dengan realisasi di lapangan, dimana program-program yang diimplementasikan belum mampu menjawab kebutuhan spesifik masyarakat atau mendorong kemandirian mereka. Jika evaluasi ini tidak dilakukan, risiko stagnansi ekonomi, pemborosan sumber daya dan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif pemberdayaan akan terus meningkat. Sebaliknya, melalui evaluasi yang

komprehensif, potensi keberlanjutan dapat diidentifikasi dan strategi baru yang lebih relevan dapat dirumuskan untuk mewujudkan jangka panjang yang signifikan bagi perekonomian masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, penulis berinisiasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut serta menuangkannya dalam suatu karya ilmiah berbentuk tugas akhir dengan judul **“Evaluasi Program Pemberdayaan UMKM Di Desa Perlis : Proyeksi, Realisasi Dan Potensi Keberlanjutan”**.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Program pemberdayaan masyarakat yang telah dilaksanakan tetapi belum dilakukan evaluasi dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Perlis secara signifikan.
2. Perlu adanya evaluasi yang komprehensif dalam pengembangan UMKM melalui identifikasi efektivitas program dan strategi perbaikannya.

1.3 Batasan Masalah

Penelitian ini fokus pada evaluasi program pemberdayaan UMKM yang pernah dilaksanakan di Desa Perlis mengenai bagaimana efektivitas program pemberdayaan UMKM yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat Desa Perlis dan identifikasi kendala utama dalam pengimplementasian program pemberdayaan yang menghambat pencapaian hasil yang optimal.

1.4 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proyeksi program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis dibandingkan dengan realisasi pelaksanaannya?

2. Apakah program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis berhasil mencapai tujuan masing-masing program tersebut?
3. Apa saja potensi keberlanjutan dari program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis untuk mendukung pengembangan ekonomi desa di masa depan?

1.5 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan capaian keberhasilan program-program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis potensi keberlanjutan program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis.
3. Untuk mengetahui dan mengevaluasi proyeksi dan realisasi program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis.

1.6 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan, wawasan, dan referensi untuk riset selanjutnya terkait evaluasi program pemberdayaan UMKM.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan pemahaman terkait hasil evaluasi dan perbaikan program pemberdayaan UMKM untuk meningkatkan kemandirian dan perekonomian masyarakat dan memberikan wawasan kritis terhadap aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan dan kegagalan program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pemberdayaan

2.1.4.1. Pengertian Pemberdayaan

Konsep pemberdayaan berasal dari istilah “daya” atau “*empowerment*”, secara harfiah merujuk pada makna “kekuatan”. Dengan demikian, pemberdayaan dapat diartikan sebagai upaya untuk memberikan kemampuan atau kekuatan kepada kelompok masyarakat yang masih berada dalam kondisi lemah dan belum mampu menjalani kehidupan secara mandiri, khususnya dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, pakaian, pendidikan, serta layanan kesehatan. Upaya untuk memberdayakan kelompok yang kurang berdaya ini merupakan tanggung jawab utama pemerintah. Namun, keberhasilan program pemberdayaan juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, terutama masyarakat sebagai kelompok sasaran, dalam setiap tahapan pelaksanaan program atau kegiatan yang dirancang (Margayaningsih, 2016).

Pemberdayaan (*empowerment*) berkembang sebagai respons terhadap dinamika sosial dan pemikiran masyarakat dalam menanggulangi persoalan seperti kemiskinan, ketidakadilan, ketimpangan, serta keterbelakangan. Robert Chambers (Ir. Hendra Hamid, 2018) mengemukakan bahwa pemberdayaan masyarakat bukan sekadar strategi pembangunan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial yang mendasar. Konsep ini menempatkan manusia sebagai pusat perhatian (*people*

centered), menekankan keterlibatan aktif masyarakat (*participatory*), mendorong peningkatan kapasitas individu dan kelompok (*empowering*), dan berkelanjutan (*sustainable*). Oleh karena itu, pemberdayaan tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga berfungsi sebagai sistem perlindungan untuk mencegah masyarakat jatuh kembali ke dalam kemiskinan (*safety net*).

2.1.4.2. Teori Pemberdayaan

John Friedman (Lomboan, Ruru and Londa, 2021) menguraikan bahwa pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari tiga aspek utama, yaitu:

- 1) *Enabling*, yaitu menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan potensi masyarakat dengan asumsi bahwa setiap individu atau kelompok memiliki kapasitas yang dapat ditingkatkan. Pemberdayaan dalam hal ini bertujuan untuk membangun serta mengoptimalkan potensi tersebut melalui dorongan, motivasi, dan peningkatan kesadaran agar mereka dapat mengenali serta mengembangkan kemampuan yang dimiliki.
- 2) *Empowering*, berfokus pada penguatan daya atau potensi masyarakat agar dapat diarahkan ke dalam kegiatan yang lebih produktif. Tidak hanya sebatas membangun lingkungan yang kondusif, pemberdayaan juga mencakup penyediaan sumber daya yang diperlukan serta membuka akses terhadap peluang yang dapat meningkatkan kemandirian masyarakat. Dengan demikian, proses pemberdayaan memiliki hubungan erat dengan penguatan nilai-nilai demokrasi, pembiasaan partisipasi aktif, serta penerapan pengalaman dalam kehidupan sosial.

- 3) *Protecting*, bertujuan untuk melindungi kelompok rentan dari keterasingan sosial, mencegah ketimpangan dalam persaingan, serta menghindarkan mereka dari eksploitasi oleh pihak yang memiliki dominasi lebih besar.

Pendekatan ini relevan dengan kondisi Desa Perlis, dimana pelaku UMKM menghadapi keterbatasan akses modal, teknologi dan keterjangkauan pasar. Agar pemberdayaan masyarakat dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, Glen, sebagaimana dikutip oleh (Sugiri, 2015) menekankan pentingnya intervensi sosial yang terbagi ke dalam dua tingkatan, yaitu intervensi mikro dan intervensi makro. Intervensi mikro berfokus pada tingkat individu, keluarga, serta kelompok kecil, sementara intervensi makro diterapkan dalam skala yang lebih luas, mencakup komunitas dan organisasi.

Intervensi makro melibatkan berbagai metode profesional yang bertujuan untuk mengubah sistem yang lebih besar dari sekadar individu atau kelompok kecil, yakni organisasi komunitas di tingkat lokal, regional, hingga nasional. Dalam praktiknya, intervensi makro diklasifikasikan ke dalam dua pendekatan utama:

- a. pendekatan direktif (*directive approach*), didasarkan pada asumsi bahwa pendamping dari lembaga pemerintah maupun non-pemerintah memiliki pemahaman lebih baik mengenai kebutuhan masyarakat. Dalam metode ini, pendamping memegang peran dominan karena mereka yang menentukan kebijakan, menilai efektivitas program, serta mengarahkan sumber daya yang diperlukan.
- b. Pendekatan non-direktif (*non-directive approach*), Berlandaskan prinsip bahwa masyarakat sendiri yang paling memahami kebutuhan dan solusi terbaik bagi

mereka. Pada pendekatan ini, pendamping berperan sebagai fasilitator yang menggali serta mengembangkan potensi masyarakat, sedangkan masyarakat menjadi aktor utama dalam proses pemberdayaan (Sugiri, 2015).

Dalam konteks pemberdayaan, Midgley dalam (Zubaedi, 2016) mengemukakan bahwa terdapat tiga strategi utama dalam pembangunan sosial, yaitu (1) pembangunan sosial berbasis individu (*social development by individuals*), strategi ini menekankan pada inisiatif individu dalam menciptakan usaha pelayanan masyarakat secara swadaya untuk mendukung pemberdayaan. Pendekatan ini lebih berorientasi pada peran individu atau sektor usaha dalam mendorong perubahan sosial dan dikenal sebagai *individuals or enterprise approach*; (2) pembangunan sosial berbasis komunitas (*social development by communities*), pendekatan ini berfokus pada kerja sama antar-anggota masyarakat dalam mengembangkan komunitas lokal mereka secara kolektif. Model ini sering disebut sebagai pendekatan komunitarian (*communitarian approach*) di mana masyarakat berperan aktif dalam merancang dan menjalankan program pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan lingkungan mereka.; dan (3) pembangunan sosial melalui pemerintah (*social development by goverments*), pembangunan sosial dijalankan melalui lembaga-lembaga yang berada dalam struktur pemerintahan. Pendekatan ini dikenal sebagai *statist approach*, di mana peran utama dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengawasi program pemberdayaan masyarakat berada di tangan pemerintah.

2.1.4.3. Tahapan Pemberdayaan

Lippit sebagaimana dikutip oleh (Widiyarta, 2017) menguraikan proses perencanaan dalam pemberdayaan masyarakat ke dalam tujuh langkah utama, yaitu:

- 1) **Penyadaran**, tahap awal yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai program pemberdayaan yang akan dijalankan, baik secara individu maupun kolektif dalam komunitas.
- 2) **Menunjukkan adanya masalah**, mengungkap permasalahan yang dihadapi, terutama yang berkaitan dengan sumber daya, kondisi lingkungan fisik/teknis, aspek sosial-budaya, serta dinamika politik. Selain itu, tahap ini juga mencakup analisis faktor penyebab, baik dari kelemahan internal maupun ancaman eksternal.
- 3) **Pemecahan masalah**, upaya untuk mengatasi permasalahan dengan mencari akar penyebabnya, mengeksplorasi berbagai alternatif solusi, serta memilih pendekatan terbaik berdasarkan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang ada.
- 4) **Kesadaran akan pentingnya perubahan**, memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai perubahan yang sedang atau akan terjadi di lingkungan mereka, sehingga mereka dapat mempersiapkan diri secara optimal dalam menghadapi perubahan tersebut.
- 5) **Melakukan pengujian dan demonstrasi**, mengimplementasikan solusi yang telah dirancang dalam skala kecil sebagai uji coba. Langkah ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas inovasi yang diterapkan serta mengidentifikasi manfaat, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul.

- 6) Produksi dan publikasi informasi, menyebarluaskan informasi yang relevan, baik yang bersumber dari luar seperti penelitian, kebijakan, atau sektor bisnis, maupun yang berasal dari dalam komunitas, seperti pengalaman lokal, teknologi tradisional, dan budaya masyarakat setempat.
- 7) Melaksanakan pemberdayaan, memberikan ruang bagi kelompok masyarakat yang kurang berdaya (*grassroots*) agar mereka dapat mengekspresikan aspirasi, membuat keputusan, dan menentukan arah perubahan sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri.

2.1.2. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Pasal 1, usaha mikro didefinisikan sebagai kegiatan usaha produktif yang dimiliki oleh individu atau badan usaha perorangan. Usaha ini tidak berstatus sebagai cabang dari usaha menengah maupun besar serta tidak berada di bawah kendali atau kepemilikan langsung maupun tidak langsung dari entitas usaha yang lebih besar. Selain itu, usaha mikro harus memenuhi kriteria tertentu yang membedakannya dari usaha kecil. Di dalam UU tersebut pada bab 4 pasal 6, UMKM diklasifikasikan menjadi :

1. Usaha mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan badan usaha perorangan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

2. Usaha kecil yang dimaksud adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah).
3. Usaha Menengah yang dimaksud adalah unit usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dalam konteks pembangunan desa, perencanaan ekonomi dan sosial menjadi aspek fundamental. Desa dipandang sebagai sistem ekonomi dan sosial yang bersifat terbuka, di mana interaksi dengan desa lain terjadi melalui pergerakan faktor produksi, perdagangan komoditas, pertukaran informasi, serta mobilitas penduduk.

Menurut Arsyad sebagaimana dikutip oleh (Widiyarta, 2017), pertumbuhan ekonomi di suatu desa dapat dicapai dengan memenuhi beberapa indikator utama, yaitu: a) Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM); b)Penguatan kelembagaan masyarakat; c) Penyediaan sarana dan fasilitas produksi; d) Kemudahan akses terhadap modal; e) Meningkatkan akses pasar.

2.1.3.1 Teori Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

1. Teori Basis Ekonomi (*Economic Base Theory*)

Harry W. Richardo (1973) dalam (Pratama, 2020) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di pedesaan sangat dipengaruhi oleh permintaan eksternal terhadap barang dan jasa yang dihasilkan. Perkembangan industri yang memanfaatkan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk tujuan ekspor akan berkontribusi pada peningkatan kekayaan daerah serta menciptakan lebih banyak peluang kerja.

2. Teori Lokasi

Alfred Weber dan Melvin Greenhut (1933) dikutip dari (Suryani, 2015) mengemukakan bahwa pemilihan lokasi usaha didasarkan pada upaya meminimalkan biaya transportasi di antara berbagai alternatif lokasi serta dipengaruhi oleh faktor aglomerasi ekonomi. Teori ini, yang dikenal sebagai teori lokasi minimum biaya, berasumsi bahwa keseimbangan lokasional tercapai melalui strategi maksimalisasi keuntungan, di mana setiap produsen memiliki dan menguasai wilayah pasarnya sendiri.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran krusial dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan rendah dan bergelut dalam usaha kecil, baik di sektor tradisional maupun modern. Selain berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, UMKM juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan dalam kemampuan kewirausahaan, kurangnya strategi pengembangan usaha, minimnya

inovasi produk, serta kendala permodalan. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai kewirausahaan menjadi faktor penghambat utama, sehingga diperlukan program pemberdayaan yang efektif untuk mendorong pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM.

Desa Perlis sebagai daerah 3T (Terluar, Terdepan, Terbelakang) dengan akses terbatas, menghadapi tantangan besar dalam hal distribusi produk, sehingga diperlukan strategi pemasaran berbasis digital dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing UMKM.

2.1.4. Evaluasi

Brinkerhoff dalam (Muryadi, 2017) mendefinisikan evaluasi sebagai suatu proses sistematis dalam mengumpulkan informasi terkait berbagai aspek pengembangan program profesional dan pelatihan guna menilai manfaat serta efektivitasnya. Sejalan dengan pendapat tersebut, Djaali, Mulyono, dan Ramly (Muryadi, 2017) menjelaskan bahwa evaluasi merupakan suatu proses penilaian yang didasarkan pada kriteria atau standar objektif tertentu. Keputusan yang dihasilkan dari proses ini digunakan sebagai indikator dalam menilai kinerja atau *assessment performance* yang dikategorikan ke dalam tiga tingkat yaitu rendah, moderat dan tinggi.

2.1.4.1. Model *Context, Input, Process* dan *Product* (CIPP)

Model *Context, Input, Process* dan *Product* (CIPP) yang dikembangkan oleh Stufflebeam (2003) merupakan model evaluasi yang bersifat komprehensif dan digunakan untuk menilai suatu program secara menyeluruh. Model ini menekankan bahwa tujuan evaluasi bukan sekadar membuktikan efektivitas

program, tetapi lebih kepada memperbaiki dan mengembangkan program agar lebih optimal (Rama *et al.*, 2023).

Evaluasi *context* dimaksud untuk mengidentifikasi kebutuhan, masalah, serta peluang yang ada, sehingga dapat membantu para pemangku kebijakan dalam menetapkan prioritas dan tujuan program, serta memberi pemahaman kepada kelompok sasaran terkait hasil yang ingin dicapai. Evaluasi masukan (*input*) dilakukan guna meninjau berbagai alternatif pendekatan, strategi, serta rencana pembiayaan yang memungkinkan, agar program dapat berjalan dengan sumber daya yang memadai. Evaluasi *process* memiliki fokus utama menilai pelaksanaan program sesuai rencana, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mengukur kinerja guna memastikan implementasi berjalan secara efektif dan mencapai hasil yang diharapkan. Evaluasi hasil (*product*) bertujuan untuk menilai dampak yang ditimbulkan oleh program, baik dalam jangka pendek maupun panjang, serta mengukur efektivitas, keberlanjutan, dan kemampuan adaptasi program terhadap kondisi yang berubah.. Evaluasi hasil ini akan dibagi menjadi penilaian terhadap dampak (*impact*), efektivitas (*effectiveness*), keberlanjutan (*sustainability*) dan daya adaptasi (*transportability*). Model ini sangat relevan untuk menilai sejauh mana program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis telah memenuhi kebutuhan masyarakat pesisir yang sebagian besar bergantung pada sektor perikanan dan industri rumahan (Winaryati *et al.*, 2021).

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2. Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	(Sugiri, 2015)	Peranan Pemerintah Dalam Pemberdayaan Masyarakat	Pemberdayaan masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dimana mereka harus berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas warganya. Upaya ini mencakup pemberian sumberdaya, peluang, pengetahuan dan keterampilan agar masyarakat mampu menentukan pilihan hidup serta berkontribusi dalam komunitasnya. Keberhasilan pemberdayaan dapat diukur melalui peningkatan di bidang pendidikan, ekonomi, sosial budaya, psikologi dan politik. Sementara hambatan yang ada berupa masalah struktural, keterisolasian geografis, norma sosial negatif dan persepsi masyarakat yang kurang mendukung perubahan.
2.	(Rahma, Abdullah and Z, 2024)	Pemberdayaan UMKM Dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat	Keberhasilan pemberdayaan UMKM di Kelurahan Darma dukung beberapa faktor utama seperti tingginya partisipasi pelaku UMKM dalam pelatihan dan pendampingan, peningkatan pengetahuan tentang kewirausahaan, pemasaran dan pembiayaan usaha serta dukungan dari pihak akademisi dan pemerintah setempat. Meski begitu, terdapat beberapa kendala yang menghambat pemberdayaan yaitu rendahnya inovasi produk, kurangnya pemahaman dalam mengakses permodalan, minimnya keterampilan pengelolaan keuangan dan pemasaran serta terbatasnya informasi terkait strategi pengembangan usaha.
3.	(Amiruddin, 2018)	Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota	Pemberdayaan merupakan upaya strategis yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas individu.

		Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan	Secara umum, keberhasilan pemberdayaan masyarakat ditentukan oleh dukungan pemerintah, partisipasi aktif masyarakat serta akses terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan yang memadai. Sebaliknya, tantangan yang terjadi sering kali muncul akibat kendala struktural, keterbatasan akses geografi, norma sosial yang kurang mendukung serta persepsi masyarakat yang belum siap terhadap perubahan. Oleh karena itu, pendekatan yang efektif harus bersifat inklusif dan berkelanjutan.
4.	(Arief, 2017)	Evaluasi Program Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Surabaya (Studi di UKM Kampung Bordir Kecamatan Rungkut)	Berdasarkan hasil evaluasi program pemberdayaan pada UKM Bordir, pelaksanaan program berjalan dengan efektif. Kelompok UKM mendapat kemudahan dalam mengakses pinjaman usaha karena difasilitasi oleh pemerintah setempat. Akuntabilitas program pemberdayaan kepada hak kelompok UKM terpenuhi dengan baik sehingga partisipasi anggota kelompok sangat baik. Program yang dirancang sebagai inovasi pemberdayaan sesuai dengan kebutuhan UKM tersebut, berupa fasilitasi mesin bordir sesuai kapasitas masing-masing pelaku usaha. Begitu pula terkait jenis dan jumlah orang/sasaran yang dijangkau dilakukan dengan tepat sehingga manfaat yang dirasakan tiap anggota merata sehingga omset meningkat dari tahun ke tahun.
5.	(Isnatul Huda, Achluddin Ibnu Rochim and Indah Murti, 2024)	Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian	Evaluasi pemberdayaan UMKM di Kelurahan Petemon, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya menerapkan teori William N. Dunn dengan enam indikator yaitu 1) efektivitas, program pemberdayaan sudah berjalan akan tetapi belum

		Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya	berjalan merata; 2) efisiensi, program tidak berjalan maksimal karena kurangnya koordinasi antar instansi; 3) kecukupan, terdapat hambatan berupa kurangnya pengetahuan dan modal dari pemilik UMKM; 4) pemerataan, bantuan yang didistribusikan belum merata; 5) responsivitas, kemampuan pihak kelurahan untuk merespon kebutuhan dan tantangan UMKM masih kurang optimal; 6) ketepatan, implementasi kebijakan pemberdayaan masih belum efektif.
6.	(Izatika, 2016)	Evaluasi Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (Pum-Rtm) Di Kabupaten Jember Tahun 2012-2014	Hasil capaian Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (PUM-RTM) di Kabupaten Jember belum optimal bila dibandingkan dengan tujuan awal yaitu mendorong produktivitas dan peningkatan pendapatan keluarga miskin. Dari enam indikator yang digunakan, terdapat tiga indikator yang efektif (akses, frekuensi dan kesesuaian program) dan tiga lainnya tidak efektif (cakupan, bias dan akuntabilitas).

2.3. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel utama yang saling terkait, yaitu proyeksi program, realisasi program dan potensi keberlanjutan. Proyeksi program mencerminkan perencanaan awal yang dirancang berdasarkan kebutuhan UMKM di Desa Perlis, dengan tujuan utama meningkatkan daya saing usaha melalui akses modal, pelatihan keterampilan, penguatan jaringan pemasaran, serta adopsi teknologi. Perencanaan ini sejalan dengan teori John Friedman dalam upaya pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari tiga sisi yaitu *enabling*, *empowering* dan *protecting*.

Namun pada implementasinya, realisasi program sering kali menghadapi tantangan struktural yang menyebabkan perbedaan antara target awal dan hasil aktual. Faktor-faktor seperti keterbatasan sumberdaya, rendahnya pengetahuan kewirausahaan serta minimnya akses terhadap pasar menjadi penghambat optimalisasi program. Dalam konteks evaluasi program pemberdayaan, model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) dari Stufflebeam akan digunakan untuk menganalisis sejauh mana program ini berhasil mencapai tujuan awalnya dan mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki.

Potensi keberlanjutan program tidak hanya bergantung pada dampak jangka pendek, tetapi juga pada sejauh mana UMKM dapat bertahan dan berkembang setelah intervensi eksternal berakhir. Jika strategi pemberdayaan yang diterapkan berhasil memperkuat struktur ekonomi lokal serta menciptakan ekosistem bisnis yang mandiri, maka program memiliki potensi keberlanjutan yang tinggi. Namun, jika program hanya memberikan dampak jangka pendek tanpa adanya dukungan regulasi dan pendampingan berkelanjutan, maka keberlanjutan UMKM dalam jangka panjang akan sulit tercapai.

2.4. Hipotesis

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka konseptual yang sudah dijelaskan di atas, maka hipotesis penelitian ini bertujuan untuk menilai apakah program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis telah tercapai sesuai dengan perencanaan mengalami kendala dalam pelaksanaannya, atau bahkan terlampaui dari target yang telah ditetapkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Sugiyono (2017) mengatakan bahwa metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga merupakan analisis teoritis suatu cara atau metode.

3.1 Jenis Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Menurut Sugiono (2022), metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian berlandaskan filsafat post-positivisme yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pendekatan dalam penelitian ini diambil karena peneliti ingin mendeskripsikan dan mendapatkan gambaran terkait UMKM yang sedang diteliti dengan mengobservasi langsung pelaku UMKM yang menjalani program pemberdayaan serta mengumpulkan data-data dan informasi yang diperlukan sebagai dasar penyusunan hasil penelitian.

3.2 Definisi Operasional

Tabel 3.2 Definisi Operasional

Variabel	Definisi Operasional	Sumber Data
Evaluasi Context (Konteks)	Evaluasi konteks dilakukan dengan menganalisis data untuk memahami kondisi awal UMKM di Desa Perlis sebelum program pemberdayaan diterapkan. Informasi mengenai tantangan, kebutuhan, dan potensi lokal dikaji untuk menentukan relevansi program dengan kondisi masyarakat setempat.	(Winaryati <i>et al.</i> , 2021)

Evaluasi Input (masukan)	Evaluasi input dilakukan untuk mengidentifikasi dan menilai kapabilitas sumberdaya material, manusia, dan biaya untuk melaksanakan program yang telah dipilih. Data diperoleh melalui observasi langsung terhadap pelaku UMKM yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan.	(Malik Ibrahim, 2018)
Evaluasi Process (proses)	Evaluasi proses adalah proses implementasi program dianalisis untuk mengidentifikasi hambatan yang terjadi di lapangan, efektivitas strategi pelaksanaan, serta keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan.	(Malik Ibrahim, 2018)
Evaluasi Product (produk)	Evaluasi produk digunakan untuk membantu memilih keputusan atau hasil yang ingin dicapai setelah program berjalan. Evaluasi ini berupaya mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat, baik yang direncanakan maupun tidak direncanakan dalam jangka pendek maupun jangka panjang.	(Sinaga, 2019)

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

3.4.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Perlis, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Desa Perlis termasuk dalam kategori daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar), saat ini Desa Perlis masih tergolong sebagai desa tertinggal berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) dan termasuk dalam kategori berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa (IPD).

3.3.1 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, dimulai dari bulan Juni hingga September 2024.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer berupa observasi langsung ke Desa Perlis untuk mengamati pola pemberdayaan masyarakat sejak perencanaan hingga berakhirnya program serta data sekunder melalui Badan Pusat Statistik (BPS), website Pemerintah Kabupaten Langkat.

3.4.1 Observasi

Observasi merupakan salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk memahami atau menganalisis perilaku non-verbal. Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa teknik ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan metode pengumpulan data lainnya, karena tidak hanya berfokus pada individu, tetapi juga dapat diterapkan pada berbagai fenomena di lingkungan sekitar. Dengan melakukan observasi, peneliti dapat menginterpretasikan perilaku yang diamati serta memahami maknanya secara lebih mendalam. Dalam konteks penelitian ini, observasi dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan guna memperoleh pemahaman faktual mengenai kondisi pelaku UMKM di Desa Perlis dalam keterlibatan mereka terhadap program pemberdayaan yang telah diimplementasikan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang melibatkan proses pencarian, pengumpulan, serta penyusunan data secara sistematis. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap pengolahan yang

mencakup analisis terhadap informasi dari berbagai sumber terkait dengan isu yang diteliti. Data yang diperoleh kemudian dimanfaatkan untuk menguraikan serta mengevaluasi pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis.

Penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) sebagai kerangka evaluasi utama, dengan tahapan :

- 1) Memahami kondisi awal masyarakat sebelum program pemberdayaan diterapkan. Evaluasi pada tahap ini mencakup identifikasi kebutuhan, tantangan, dan peluang yang ada di desa, serta bagaimana program yang dirancang dapat menyesuaikan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat setempat.
- 2) Menganalisis sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program, baik dalam aspek perencanaan, pendanaan, tenaga pendukung, maupun keterlibatan berbagai pihak dalam mendukung implementasi pemberdayaan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai apakah sumber daya yang tersedia telah memadai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- 3) Memantau pelaksanaan program di lapangan, termasuk sejauh mana kegiatan pemberdayaan telah berjalan sesuai rencana, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam prosesnya, serta kendala yang mungkin dihadapi dalam implementasi.
- 4) Mengevaluasi capaian program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Evaluasi ini menilai apakah program yang dijalankan telah tercapai sesuai target, mengalami kendala dalam pencapaiannya, atau bahkan melampaui harapan, serta bagaimana potensi keberlanjutannya dalam mendukung pembangunan desa di masa depan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum

4.1.1 Kondisi Geografis Desa Perlis

Desa Perlis berada di pesisir timur Provinsi Sumatera Utara yang berbatasan dengan laut dan tepi kawasan hutan yang termasuk ke dalam bagian Kecamatan Berandan Barat, Kabupaten Langkat. Luas Wilayah Desa Perlis adalah sebesar 611 Ha, berjarak kurang lebih 10 Km dari Stabat Ibu Kota Kecamatan dan 93 Km dari Medan. Penduduk Desa Perlis berjumlah 5.446 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 2.295 jiwa yang terbagi di dalam 9 dusun (BKKBN, 2024).

Desa Perlis dan Kota Pangkalan Berandan dipisahkan oleh sebuah sungai bernama Babalan yang mengalir di wilayah Langkat menuju Selat Malaka. Masyarakat Desa Perlis membangun pemukiman penduduk di atas laut menyambung ke daratan dengan membangun rumah panggung dengan tipografi dataran rendah. Untuk akses transportasi, mereka mengandalkan sampan dan perahu untuk pergi ke kota dan menangkap ikan (Tanjung and Sinaga, 2019).

4.1.2 Kondisi Demografi Desa Perlis

Berdasarkan letak dan posisinya yang menempati kawasan pesisir, desa Perlis dikenal sebagai perkampungan nelayan yang mayoritas penduduknya bergantung pada hasil tangkapan ikan sebagai sumber utama penghidupan. Meski begitu, terdapat sejumlah warga yang menjalankan usaha dagang, guru, buruh, PNS dan petani. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa setempat,

didapatkan temuan bahwa pendapatan rata-rata masyarakat sebesar Rp. 1.000.000 yang berada di bawah standar pendapatan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan jumlah angkatan kerja 2.574 jiwa (Sumber : Arsip Desa). Saat ini Desa Perlis tergolong tertinggal menurut Indeks Desa Membangun dan tergolong berkembang menurut Indeks Pembangunan Desa.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh (Hariani RS, 2021) sungai dan laut di sekitar Desa Perlis merupakan habitat berbagai jenis ikan seperti ikan gembung, senangin, kuring, cerbung, kepiting dan udang. Dibidang kewirausahaan sudah terjadi upaya untuk mengolah hasil laut menjadi produk khas seperti terasi, kerupuk ikan, ikan asin dan olahan ikan lainnya. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran bahwa ada inisiatif pengembangan selain menjual mentah hasil laut.

4.1.3 Kondisi UMKM Desa Perlis

Dalam sistem pembagian tugas dalam menjalankan usaha rumahan skala UMKM di Desa Perlis, setiap keluarga rata-rata menerapkan sistem dimana suami sebagai nelayan akan menangkap ikan 4 kali dalam seminggu di laut. Sebagian hasil ikan akan dijual segar setelah ditangkap di pasar Pangkalan Berandan. Sebagian hasil ikan akan diolah menjadi terasi, ikan asin atau olahan ikan lainnya oleh istri dan anak-anak mereka, jadi mereka jarang membayar pegawai untuk membantu mereka karena menganggap margin keuntungan untuk skala usaha mikro tidak cukup untuk membayar tenaga pembantu. Hanya pelaku usaha yang sudah skala kecil hingga menengah yang akan mempekerjakan tenaga pembantu dengan gaji harian untuk membersihkan ikan dan membantu produksi.

Garam memiliki berbagai kegunaan, mulai dari bahan masakan hingga keperluan manufaktur dan produk olahan lainnya. Kandungan garam yang tinggi dalam air laut memungkinkan pemanfaatannya sebagai bahan baku utama dalam produksi garam. Di Desa Perlis, komunitas UMKM mampu menghasilkan sekitar 50 kg garam dari proses pengolahan air laut. Selain itu, masyarakat juga memproduksi berbagai hasil laut lainnya, seperti terasi, belacan, ikan asin, serta aneka olahan berbasis ikan. Kapasitas produksi setiap pelaku UMKM bervariasi, dengan rata-rata mencapai 10 hingga 15 Kg per hari, tergantung pada ketersediaan hasil tangkapan ikan.

Industri pengolahan terasi di Desa Perlis mengalami perkembangan pesat sejak berdirinya rumah terasi pertama di Dusun I. Keberadaan rumah produksi ini menginspirasi banyak warga untuk turut serta dalam usaha serupa hingga menjadi industri rumahan yang berkembang. Para produsen belacan di desa ini menjadikan usaha tersebut sebagai mata pencaharian utama mereka. Terasi hasil produksi masyarakat Desa Perlis bahkan mampu bersaing dengan produk dari luar, seperti terasi dari Pulau Kampai yang dikenal sebagai salah satu sentra penghasil terasi di pesisir Kabupaten Langkat. Dalam setiap produksi, pelaku UMKM dapat menghasilkan antara 7 hingga 100 kg terasi, bergantung pada jumlah tangkapan ikan yang tersedia. Salah satu produsen terasi, Fakhruddin, telah menjalankan usaha ini selama 22 tahun dan memiliki reputasi yang kuat di kalangan konsumen di Sumatera Utara. Produk terasinya telah dipasarkan hingga Pekanbaru, Palembang, Batam, bahkan mencapai Malaysia. Keunggulan kualitas produknya

membuat mantan Gubernur Sumatera Utara menjadi pelanggan tetap yang rutin memesan terasi setiap bulan.

Sumber pendapatan pelaku usaha UMKM lainnya adalah ikan asin. Ikan hasil tangkapan nelayan yang tidak habis terjual akan diolah menjadi ikan asin untuk meningkatkan daya tahan dan nilai jualnya. Proses pengawetan ini dilakukan dengan menambahkan garam dalam jumlah tinggi, yang berfungsi sebagai pengawet alami. Dengan metode ini, ikan dapat disimpan pada suhu ruang selama berbulan-bulan asalkan dikemas dalam kondisi tertutup rapat. Dalam sekali produksi, nelayan mampu mengolah sekitar 10 hingga 20 kg ikan yang tidak terjual menjadi ikan asin, sementara setiap pelaku UMKM dapat menghasilkan antara 7 hingga 15 kg ikan asin, tergantung pada ketersediaan bahan baku.

Sebagian warga Desa Perlis juga menjalankan usaha tambak udang sebagai sumber mata pencaharian. Kegiatan ini merupakan usaha ekonomi yang melibatkan pengelolaan serta pengendalian sumber daya perikanan dengan tujuan meningkatkan keuntungan, pendapatan, dan kesejahteraan para pembudidaya. Pembangunan tambak diarahkan untuk mengembangkan budidaya perikanan dari sistem sederhana menuju metode yang lebih modern. Namun, petani tambak udang di Desa Perlis menghadapi berbagai kendala, seperti terbatasnya akses terhadap modal dan pasar, terutama bagi tambak berskala kecil. Selain itu, rendahnya pengetahuan kewirausahaan serta sulitnya memperoleh benih udang berkualitas semakin mengurangi jumlah pembudidaya. Ditambah lagi, keterbatasan pasar yang menawarkan harga wajar memaksa mereka menjual hasil panen ke tengkulak dengan harga rendah.

4.1.4 Program Pemberdayaan UMKM di Desa Perlis

Dari beberapa program pemberdayaan masyarakat yang pernah dilakukan di Desa Perlis, hanya Program Peningkatan Kapasitas Organisasi Mahasiswa (PPK Ormawa) Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang melakukan program pemberdayaan UMKM dengan melakukan pendampingan intensif.

4.1.4.1 Proyeksi Program Pemberdayaan UMKM

Perencanaan program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis dilakukan dengan pendekatan berbasis partisipatif yang melibatkan masyarakat secara aktif dalam setiap tahapannya. Sebelum program ini dirancang, tim pelaksana terlebih dahulu melakukan kunjungan awal ke Desa Perlis untuk melakukan observasi langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM.

Pada tahap awal, tim melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, termasuk pelaku UMKM, aparat desa, serta kelompok masyarakat yang berperan dalam aktivitas ekonomi di desa. Dalam wawancara ini, terdapat beberapa temuan utama yang menjadi dasar dalam perencanaan program pemberdayaan. Salah satu permasalahan utama yang diidentifikasi adalah minimnya akses terhadap modal usaha, yang menyebabkan banyak UMKM sulit untuk mengembangkan usaha mereka. Selain itu, pelaku usaha juga mengungkapkan kesulitan dalam memasarkan produk mereka ke luar desa karena keterbatasan jaringan distribusi dan kurangnya pemahaman mengenai pemasaran digital. Tantangan lain yang dihadapi adalah kurangnya

keterampilan dalam pengelolaan usaha, termasuk dalam hal pencatatan keuangan, inovasi produk, serta pengemasan yang menarik untuk meningkatkan daya saing di pasar yang lebih luas.

Setelah mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber, tim kemudian melakukan analisis tren dan prediksi dampak program dalam jangka panjang. Berdasarkan tren saat ini, peningkatan digitalisasi menjadi faktor kunci dalam pertumbuhan UMKM di berbagai daerah. Oleh karena itu, program ini dirancang untuk memasukkan pelatihan digital marketing sebagai salah satu komponen utama guna membantu UMKM di Desa Perlis beradaptasi dengan perubahan pasar yang semakin berbasis teknologi. Selain itu, tren pertumbuhan ekonomi berbasis komunitas juga menjadi pertimbangan utama, sehingga pengaktifan kembali BUMDes sebagai pengelola usaha desa menjadi salah satu strategi yang direncanakan agar program ini dapat berjalan secara lebih terstruktur dan berkelanjutan.

4.1.4.2 Realisasi Program Pemberdayaan UMKM

Dalam pelaksanaan pelatihan digital marketing, program ini berhasil diselenggarakan dengan menghadirkan materi mengenai pemasaran berbasis media sosial, pembuatan konten promosi, serta penggunaan platform e-commerce sebagai sarana distribusi produk UMKM. Namun, dalam realisasinya, program ini mengalami tantangan signifikan karena mayoritas pelaku UMKM di Desa Perlis adalah ibu-ibu yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan teknologi digital (gagap teknologi). Banyak dari mereka bahkan tidak memiliki ponsel pintar (Android), sehingga selama pelatihan mereka

harus didampingi oleh anak-anak mereka yang memiliki akses ke perangkat teknologi. Hal ini menyebabkan transfer pengetahuan dan keterampilan digital marketing menjadi tidak maksimal karena penggunaan media digital tidak dilakukan langsung oleh pelaku UMKM itu sendiri. Akibatnya, meskipun pelatihan telah berjalan sesuai dengan perencanaan awal, penerapannya dalam praktik masih jauh dari optimal.

Pada aspek pendampingan legalitas usaha, program ini berhasil mencapai salah satu target awal dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebagai langkah awal dalam proses legalisasi UMKM. Namun, legalitas formal di tingkat pemerintah daerah masih belum terealisasi, sehingga pelaku usaha di Desa Perlis belum dapat mengakses berbagai bantuan resmi, seperti program modal usaha, bantuan peralatan, serta pelatihan lanjutan dari pemerintah daerah. Keterlambatan dalam penyelesaian legalitas ini menyebabkan target yang telah ditetapkan dalam perencanaan belum sepenuhnya tercapai.

Selain itu, dalam upaya pengaktifan kembali BUMDes sebagai pengelola usaha desa, realisasi program berjalan sangat lambat. Meskipun struktur organisasi telah dibentuk, namun implementasinya di lapangan masih mengalami berbagai hambatan, terutama dalam koordinasi dan partisipasi aktif pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha masih lebih nyaman dengan sistem pemasaran konvensional dan belum melihat manfaat dari pemasaran kolektif yang dikelola oleh BUMDes. Selain itu, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola BUMDes menyebabkan inisiatif ini berjalan lambat

dan belum menunjukkan dampak signifikan terhadap peningkatan pemasaran produk UMKM.

Secara keseluruhan, program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis telah berhasil direalisasikan dalam beberapa aspek, seperti pelaksanaan pelatihan digital marketing, pendampingan legalitas usaha, dan pembentukan struktur kelembagaan BUMDes. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan besar yang menyebabkan pencapaian target belum optimal. Rendahnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM, keterbatasan akses terhadap perangkat teknologi, lambatnya proses legalitas usaha, serta kurangnya keterlibatan aktif dalam sistem pemasaran kolektif menjadi kendala utama dalam keberhasilan program ini. Oleh karena itu, untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas program, diperlukan strategi pendampingan yang lebih intensif serta kolaborasi lebih lanjut dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya agar hasil yang diharapkan dapat tercapai sesuai dengan rencana awal.

4.1.4.3 Potensi Keberlanjutan

Salah satu faktor utama yang berperan dalam keberlanjutan program adalah keberhasilan penyelesaian legalitas UMKM. Saat ini, proses legalisasi usaha masih berjalan, dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa telah diterbitkan sebagai langkah awal. Namun, hingga legalitas di tingkat pemerintah daerah terselesaikan, pelaku UMKM belum dapat mengakses berbagai bentuk bantuan resmi, seperti modal usaha, peralatan produksi, serta program pembinaan dan pemasaran dari pemerintah. Jika legalitas ini dapat

dipercepat dan semua pelaku UMKM diakui secara hukum, maka keberlanjutan program akan semakin terjamin karena mereka dapat memperoleh dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah dan mitra eksternal.

Dukungan dari pemerintah daerah menjadi aspek krusial dalam menjamin kelangsungan program. Saat ini, bantuan dari pemerintah daerah masih terbatas karena status legalitas UMKM belum sepenuhnya terselesaikan. Namun, jika legalitas tersebut telah terpenuhi, pemerintah dapat memberikan berbagai fasilitas yang akan meningkatkan ketahanan usaha, seperti sosialisasi kewirausahaan, pelatihan lanjutan, bantuan modal, serta akses pasar yang lebih luas melalui program UMKM binaan daerah. Dengan adanya keterlibatan pemerintah yang lebih aktif, program ini dapat berkembang dari sekadar inisiatif berbasis komunitas menjadi program pemberdayaan yang lebih mapan dan memiliki dampak jangka panjang.

Selain itu, kesiapan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara mandiri juga menjadi faktor penentu keberlanjutan. Meskipun program telah memberikan pelatihan digital marketing dan pendampingan usaha, tingkat adopsi teknologi di kalangan pelaku UMKM masih rendah karena keterbatasan literasi digital dan akses terhadap perangkat teknologi. Jika hambatan ini tidak diatasi melalui pendampingan lanjutan, maka potensi keberlanjutan program dalam hal digitalisasi pemasaran akan terhambat. Oleh karena itu, diperlukan inisiatif untuk menyediakan perangkat teknologi bagi pelaku UMKM serta

pendampingan yang lebih berkelanjutan agar mereka dapat benar-benar menerapkan strategi pemasaran digital dalam jangka panjang.

Di sisi lain, pengaktifan kembali BUMDes sebagai wadah pemasaran kolektif memiliki potensi besar dalam mendukung keberlanjutan program. Namun, saat ini, implementasi BUMDes masih berjalan lambat akibat minimnya sumber daya manusia yang kompeten dalam mengelola unit usaha desa. Jika pengelolaan BUMDes dapat diperkuat melalui pelatihan manajemen usaha dan pendampingan dari pihak eksternal, maka keberlanjutan program akan semakin terjamin. BUMDes dapat menjadi platform pemasaran yang membantu pelaku UMKM dalam distribusi produk secara lebih luas, serta sebagai lembaga yang dapat menjembatani kerja sama dengan mitra usaha di luar desa.

4.2 Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini menggunakan model CIPP (*Context, Input, Process, Product*) untuk meneliti hubungan antar variabel.

4.2.1 Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model evaluasi CIPP (*Context, Input, Process, Product*) yang mencakup empat aspek utama dalam menilai efektivitas program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis. Model ini digunakan untuk menguji hipotesis yang diajukan yaitu sejauh mana proyeksi, realisasi dan potensi keberlanjutan dari program pemberdayaan

UMKM berpengaruh terhadap keberhasilan pemberdayaan UMKM di Desa Perlis.

1. Evaluasi konteks, hipotesis yang diuji adalah apakah program pemberdayaan UMKM telah dirancang berdasarkan kebutuhan nyata pelaku usaha di Desa Perlis. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, ditemukan bahwa mayoritas UMKM di desa ini menghadapi berbagai kendala utama, seperti keterbatasan modal usaha, rendahnya akses terhadap pasar, minimnya inovasi dalam pengolahan produk, serta rendahnya tingkat literasi digital di kalangan pelaku usaha, yang sebagian besar merupakan ibu rumah tangga dengan keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Oleh karena itu, program ini dirancang dengan memasukkan pelatihan digital marketing, pendampingan legalitas UMKM, serta strategi pemasaran berbasis komunitas melalui pengaktifan kembali BUMDes. Hipotesis yang menyatakan bahwa program ini telah disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat dapat diterima, karena rencana intervensi yang dibuat telah mempertimbangkan kondisi riil di lapangan dan dirancang untuk menjawab permasalahan yang ada. Namun, efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan pelaku UMKM masih perlu diuji lebih lanjut melalui evaluasi input, proses, dan hasil program.
2. Evaluasi masukan (input), hipotesis yang diuji adalah apakah sumber daya yang dialokasikan dalam program ini telah mencukupi untuk mendukung realisasi pemberdayaan UMKM secara optimal. Program ini mendapatkan dukungan dari PPK Ormawa dalam bentuk pelatihan dan pendampingan usaha, serta adanya inisiatif dari pemerintah desa dalam mendukung proses

legalitas usaha dengan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebagai langkah awal. Namun, dalam implementasinya, ditemukan bahwa keterbatasan sumber daya, terutama dalam aspek modal usaha dan akses terhadap bantuan peralatan produksi, masih menjadi hambatan utama. Pemerintah daerah belum dapat memberikan dukungan penuh karena status legalitas UMKM belum sepenuhnya terselesaikan, sehingga pelaku usaha belum memenuhi syarat untuk menerima berbagai bentuk bantuan yang tersedia. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa sumber daya yang tersedia sudah mencukupi hanya dapat diterima secara parsial. Meskipun terdapat upaya pendampingan dan fasilitasi program, keterbatasan dalam akses modal dan infrastruktur pendukung masih menjadi kendala yang perlu diatasi agar program dapat berjalan lebih efektif.

3. Evaluasi proses, hipotesis yang diuji adalah apakah implementasi program pemberdayaan telah berjalan sesuai dengan proyeksi yang telah dibuat sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, pelaksanaan program mengalami tantangan yang cukup besar, terutama dalam adopsi teknologi digital oleh pelaku UMKM. Sebagian besar peserta pelatihan digital marketing adalah ibu-ibu yang tidak memiliki ponsel pintar (smartphone), sehingga selama pelatihan mereka harus didampingi oleh anak-anak mereka yang memiliki perangkat Android. Kendala ini menyebabkan transfer pengetahuan menjadi kurang efektif, karena penerapan strategi digital marketing tidak dapat dilakukan langsung oleh pelaku UMKM. Selain itu, pengaktifan kembali BUMDes sebagai wadah pemasaran produk UMKM juga

mengalami hambatan, di mana implementasinya berjalan sangat lambat akibat kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan usaha desa. Hipotesis yang menyatakan bahwa realisasi program telah berjalan sesuai dengan rencana hanya dapat diterima secara parsial, karena meskipun program telah terlaksana, efektivitas implementasinya masih menghadapi berbagai kendala teknis dan sosial yang menghambat pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Evaluasi hasil (*product*), hipotesis yang diuji adalah apakah program pemberdayaan UMKM memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas usaha masyarakat serta memiliki potensi keberlanjutan dalam jangka panjang. Program ini telah menghasilkan beberapa pencapaian awal, seperti meningkatnya kesadaran pelaku UMKM akan pentingnya legalitas usaha dan pemasaran digital, serta adanya upaya penguatan kelembagaan usaha desa melalui BUMDes. Namun, dampak program dalam aspek peningkatan pendapatan dan daya saing produk UMKM masih terbatas. Hingga saat ini, legalitas UMKM masih dalam proses penyelesaian, sehingga berbagai bantuan yang seharusnya dapat meningkatkan kapasitas usaha masyarakat belum bisa diakses. Selain itu, pemasaran berbasis digital yang menjadi salah satu fokus utama program masih belum dapat diimplementasikan secara optimal oleh sebagian besar pelaku UMKM karena keterbatasan akses terhadap teknologi dan minimnya literasi digital. Keberlanjutan program ini juga masih bergantung pada percepatan legalitas usaha, keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan dukungan

tambahan, serta kesiapan pelaku UMKM dalam mengelola usaha mereka secara lebih mandiri. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa program ini memiliki dampak signifikan dan potensi keberlanjutan yang tinggi hanya dapat diterima dengan catatan bahwa masih diperlukan intervensi tambahan untuk memastikan program ini dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

4.2.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan model CIPP, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis telah dirancang berdasarkan kebutuhan masyarakat dan telah memberikan dampak awal yang positif terhadap peningkatan kapasitas usaha. Namun, masih terdapat berbagai kendala dalam aspek implementasi, akses modal, adopsi teknologi, serta penyelesaian legalitas usaha yang menyebabkan pencapaian target belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas dan keberlanjutan program ini, diperlukan langkah strategis tambahan, seperti percepatan legalitas usaha, peningkatan akses modal dan bantuan pemerintah, pendampingan lanjutan dalam pemasaran digital, serta penguatan peran BUMDes sebagai wadah pemasaran dan pengelolaan usaha berbasis komunitas. Dengan strategi yang tepat dan dukungan dari berbagai pihak, program ini memiliki potensi untuk berkembang menjadi inisiatif pemberdayaan UMKM yang lebih efektif dan berkelanjutan di masa depan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis telah dirancang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi kendala modal, akses pasar, literasi digital, dan legalitas usaha. Namun, dalam implementasinya, masih terdapat hambatan signifikan. Pelaksanaan program mengalami kendala utama dalam pelatihan digital marketing, karena mayoritas pelaku UMKM tidak memiliki ponsel pintar dan keterbatasan dalam literasi digital. Pengaktifan kembali BUMDes juga berjalan lambat, sementara legalitas usaha masih dalam proses sehingga bantuan pemerintah belum dapat diakses.

Meskipun program ini telah meningkatkan kesadaran pelaku UMKM mengenai pemasaran digital dan legalitas usaha, dampak nyata dalam peningkatan pendapatan dan kemandirian usaha masih terbatas. Keberlanjutan program bergantung pada percepatan legalitas usaha, peningkatan akses modal dan teknologi, serta optimalisasi peran BUMDes. Dengan dukungan lebih lanjut, program ini memiliki potensi untuk memberikan manfaat jangka panjang bagi UMKM di Desa Perlis.

5.2 Saran

Agar program pemberdayaan UMKM di Desa Perlis dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan, diperlukan langkah strategis yang lebih konkret. Pemerintah daerah perlu mempercepat penyelesaian legalitas UMKM agar pelaku usaha dapat mengakses bantuan resmi, termasuk modal dan fasilitas produksi.

Pelatihan digital marketing sebaiknya lebih disesuaikan dengan kondisi masyarakat, misalnya dengan menyediakan perangkat teknologi serta pendampingan yang lebih intensif bagi pelaku usaha yang belum terbiasa dengan teknologi digital. Selain itu, pengelolaan BUMDes perlu diperkuat dengan pelatihan manajemen usaha agar dapat lebih aktif dalam mendukung pemasaran produk UMKM.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi referensi dalam mengeksplorasi strategi pemberdayaan UMKM yang lebih efektif, terutama dalam aspek legalitas, pemasaran berbasis digital, dan peran kelembagaan desa. Penelitian mendatang dapat lebih mendalami dampak jangka panjang dari program ini serta mengevaluasi efektivitas berbagai model intervensi dalam meningkatkan daya saing UMKM di daerah tertinggal seperti Desa Perlis.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan utama dalam penelitian ini terletak pada metode yang digunakan, yaitu observasi kualitatif, yang lebih menekankan pada deskripsi dan analisis tanpa pengukuran kuantitatif. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika program pemberdayaan UMKM, tetapi belum dapat memberikan bukti konkret dalam bentuk data numerik yang lebih terukur. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian kuantitatif, seperti analisis statistik terhadap peningkatan pendapatan UMKM, tingkat adopsi pemasaran digital, atau dampak legalitas usaha terhadap akses bantuan pemerintah. Dengan pendekatan kuantitatif, efektivitas program dapat dibuktikan secara lebih konkret dan terukur.

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, A. (2018) 'Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Binaan Dinas Perdagangan Kota Surabaya Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan', *Jurnal Universitas Airlangga*, pp. 1–8.
- Arief, R.I. (2017) 'Evaluasi Program Pemberdayaan UKM Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Kota Surabaya (Studi di UKM Kampung Bordir Kecamatan Rungkut)', *Kebijakan dan Manajemen Publik*, 5(1), pp. 1–7.
- BKKBN (2024) *BKKBN Desa Perlis*.
- BPS (2015) 'Kajian Sosial dan Ekonomi Desa Maritim', *Kajian Desa Maritim 2015*, p.105. Available: [bps.go.id:http://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html](http://www.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html).
- Endah, K. (2020) 'Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa', *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(1), pp. 135–143. Available at: <https://jurnal.unigal.ac.id/moderat/article/view/3319/2914>.
- Hariani RS, P. (2021) *Potensi Desa Perlis Kecamatan Berandan Barat Langkat*. Available at: <https://www.analisamedan.com/pendidikan/potensi-desa-perlis-kecamatan-berandan-barat-langkat/>.
- Hidayat, A., Lesmana, S. and Latifah, Z. (2022) 'Peran Umkm (Usaha, Mikro, Kecil, Menengah) Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional', *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(6), pp. 6707–6714.
- Insani, F., Harahap, I. and Syahriza, R. (2024) 'Analisis Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Perlis Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat', *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7(3), pp. 153–163. Available at: <https://doi.org/10.37329/ganaya.v7i3.3338>.
- Ir. Hendra Hamid, M.S. (2018) *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat, De La Macca*.
- Isnatul Huda, Achluddin Ibnu Rochim and Indah Murti (2024) 'Evaluasi Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sebagai Upaya Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kelurahan Petemon Kecamatan Sawahan Kota Surabaya', *Lokawati: Jurnal Penelitian Manajemen dan Inovasi Riset*, 2(4), pp. 229–235. Available at:

- <https://doi.org/10.61132/lokawati.v2i4.1031>.
- Izatika, N.I. (2016) 'Evaluasi Program Usaha Mikro Rumah Tangga Miskin (Pum-Rtm) Di Kabupaten Jember Tahun 2012-2014', 4. Available at: <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/47710>.
- Lomboan, D.V.Y., Ruru, J. and Londa, V. (2021) 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir di Desa Kumu Kecamatan Tombariri Kabupaten Minahasa', *Jurnal Administrasi Publik*, 7(102), p. 28.
- Malik Ibrahim, M. (2018) *Penelitian Evaluasi Bidang Pendidikan (Pendekatan Kualitatif)*, Alauddin University Press, Makassar.
- Margayaningsih, D.I. (2016) 'Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan', *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, 9(1), pp. 158–190. Available at: <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77/71>.
- Muryadi, A.D. (2017) 'Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi', *Jurnal Akuntansi*, 11(1), pp. 1–16.
- Pratama, M.P. (2020) 'Analisis dan Kontribusi Sektor Basis Non-Basis: Penentu Potensi Produk Unggulan Kabupaten Kebumen', *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 9(1), pp. 75–82. Available at: <https://doi.org/10.32639/jiak.v9i1.313>.
- Rahayu, S.E., RS, P.H. and Sinambela, E. (2022) 'Penerapan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam Upaya Untuk Mensejahterakan Masyarakat Tanpa Kemiskinan di Kecamatan Brandan Barat Kabupaten Langkat', *Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Kolaborasi Multidisiplin Ilmu Untuk Bangkit Lebih Kuat di Era Merdeka Belajar*, 3(1), pp. 439–462. Available at: <https://ojs.serambimekkah.ac.id/semnas/article/view/5223/3833>.
- Rahma, N., Abdullah and Z, N. (2024) 'Pemberdayaan UMKM dalam Meningkatkan Kemandirian Masyarakat', *Jurnal Masyarakat Mandiri*, 8(3), p. 2526. Available: <https://journal.ummat.ac.id/index.php/jmm/article/view/22339/pdf>.
- Rama, A. *et al.* (2023) 'Konsep model evaluasi context, input, process dan product (CIPP) di sekolah menengah kejuruan', *JRTI (Jurnal Riset Tindakan*

- Indonesia*), 8(1), p. 82. Available at: <https://doi.org/10.29210/30032976000>.
- Sabarisman, M. (2017) 'Identifikasi Dan Pemberdayaan Masyarakat Miskin Pesisir', *Sosio Informa*, 3(3), pp. 216–235. Available at: <https://doi.org/10.33007/inf.v3i3.707>.
- Sinaga, D. (2019) 'Evaluasi Program Pendidikan', p. 109.
- Sugiri, L. (2015) 'Lasiman Sugiri Dosen Jurusan Administrasi Negara STISIPOL Dharma Wacana Metro Abstract This article highlights role of it ' s the local government and his staff in', pp. 56–65.
- Suryani, Y. (2015) 'Teori Lokasi Dalam Penentuan Pembangunan Lokasi Pasar Tradisional (Telaah Studi Literatur)', *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akutansi (SNEMA)*, (c), pp. 152–163. Available at: <http://fe.unp.ac.id/>.
- Tanjung, S. and Sinaga, R. (2019) 'Masyarakat Sungai Babalan: Sejarah Sosial Desa Perlis, Pangkalan Brandan (1940-2004)', *Jasmerah: Journal of Education and Historical Studies*, 1(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.24114/jasmerah.v1i2.13008>.
- Widiyarta, A. (2017) 'Dinamika governance', *Ilmu Administrasi Negara*, 7(April), pp.64–81. Available: <http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jdg/article/view/1198>.
- Winaryati, E. *et al.* (2021) *Model-model evaluasi aplikasi dan kombinasinya*, Penerbit KBM Indonesia.
- Zubaedi (2016) 'Pengembangan Masyarakat : Wacana & Praktik', *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik (1st ed.)*, pp. 1–270.